

**EFEKTIVITAS INTERMEDIASI PERBANKAN
DI SUL-SEL**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi*



OLEH :

**DEDY INDRA GUNAWAN
A 111 00 501**

PERIP	
Tgl. Pengantar	29 Agustus 08
Aes. Pengantar	fab. Ekonomi
Banyaknya	1 (satu) eksemplar
Harga	H
No. Inventaris	450/29-08-08
Id. Klas	

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005**

**EFEKTIVITAS INTERMEDIASI PERBANKAN
DI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi*


OLEH :

DEDY INDRA GUNAWAN

A111 00 051

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I


(DR. MARSUKI, DEA)

PEMBIMBING II


(DRS. BAKHTIAR MUSTARI, M.Si)

KATA PENGANTAR

Benar rupanya tidak ada kata telambat dalam segala upaya ketidaksempurnaan manusia, bila kehendaknya pun tiba. Alhamdulillah, betapa pun tidak sempurnanya perjuangan hidup dan belajar yang tidak pernah selesai, skripsi ini muncul juga seperti ada adanya. Skripsi ini tentu tidak melebihi pula batas-batas kemampuan atas rahmat yang dilimpahkan Allah kepada penulis, atas nikmat kebersamaan dalam perjalanan meraih salah satu cita-cita akademik luhur penulis.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati atas segala dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Rady A. Gani selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Patta Kadir, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Bapak Drs. Tadjuddin Parenta, MA dan Bapak Drs. Anas Siswanto, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan
4. Bapak Dr. Marsuki, DEA, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustri, M.Si selaku Pembimbing II.
5. Bapak Drs. Madris, M.Si, selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh Pegawai Bank Indonesia, yang telah membantu dan memberikan waktu dalam melakukan penelitian.
7. Kedua Orang Tua Patta Gau dan St. Intang, yang telah memberikan doa dan dorongan dalam menyelesaikan studi ini
8. Buat saudara-saudaraku yaitu Dewi, Devi, Desi, Debi, Deni, dan Ima.

9. Teman-teman se-Angkatan yang tak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritikan yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan hati ikhlas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, serta mudah-mudahan ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi untuk kemanusiaan.

Maha suci engkau Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala hikmah, engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Wallahu a'lam.

Makassar, 10 Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank.....	8
2.1.1. Pengertian Bank.....	8
2.1.2. laporan Keuangan Bank dan Fungsinya.....	12
2.1.3. Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank.....	13
2.2. Fungsi Intermediasi.....	13
2.2.1. Pengertian Fungsi Intermediasi.....	13
2.3. Efektivitas.....	16
2.3.1 Pengertian Efektivitas.....	16
2.4. Loan to Deposit Rasio.....	16
2.4.1 Pengertian Loan to Deposit Rasio.....	16
2.4.2 Sumber Dana Bank.....	18

2.4.3 Pengguna Dana Bank.....	18
2.5. Kerangka Pikir.....	21
2.6 Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Obyek dan Tempat Penelitian.....	34
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4. Metode Analisis.....	35
3.5. Batasan Variabel.....	36
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Perkembangan Perbankan.....	37
4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga.....	39
4.3 Perkembangan Penyaluran Kredit.....	46
4.4 Loan to Deposit Ratio (LDR).....	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai pada 1 Januari 2001 telah berjalan selama kurang lebih empat tahun. Selama dalam kurun waktu tersebut sudah cukup untuk melihat beberapa permasalahan mendasar yang timbul dari implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut.

Salah satu permasalahan yang dapat dikatakan sebagai permasalahan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah keterbatasan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah selain disebabkan oleh belum optimalnya pemerintah daerah untuk menggali semua potensi penerimaan daerah, juga disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah pusat untuk sepenuhnya menjalankan pembagian dana baik dana alokasi umum maupun alokasi khusus.

Dengan keterbatasan sumber-sumber penerimaan, maka akan sulit untuk mengharapkan bahwa pemerintah daerah dapat memainkan peranannya sebagai pendorong utama pembangunan di daerah secara optimal. Oleh sebab itu, adalah sangat wajar bila pemerintah daerah pada periode awal otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sangat mengharapkan

bahwa sektor swasta dapat lebih berperan melaksanakan pembangunan daerah. Dalam kaitan itu maka sumber-sumber pembiayaan bagi sektor swasta menjadi sangat perlu untuk dikembangkan. Salah satu sumber pembiayaan yang utama bagi sektor swasta tersebut adalah perbankan.

Sehubungan dengan peranan perbankan, tuntutan akan tersedianya sumber-sumber pembiayaan pembangunan di daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk mempertanyakan kembali efektivitas pelaksanaan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa lembaga perbankan di daerah belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dimana penyaluran kredit jauh lebih kecil bila dibandingkan penghimpunan dana. Hal ini tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan daerah yang sangat kecil. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1999 dana masyarakat yang berhasil dihimpun sebesar Rp 7.943.596 juta, dan kredit yang disalurkan sebesar Rp 3.636.318 juta dengan LDR hanya mencapai 45,77%. Kemudian pada tahun 2000 dana masyarakat yang berhasil dihimpun sebesar Rp 8.765.591 juta, dan kredit yang disalurkan sebesar Rp 4.860.185 juta dengan LDR hanya mencapai 55,44%. Kemudian pada tahun 2001 dana masyarakat yang berhasil dihimpun sebesar Rp 10.593.337 juta dan kredit yang disalurkan sebesar Rp 6.032.155 juta dengan LDR hanya mencapai 56,94%.

Lebih lanjut dengan didasari kepada rasio penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana (LDR), berbagai pihak di daerah meyakini bahwa daerahnya mengalami "*capital flight*" karena dana yang diserap oleh perbankan di daerah itu tidak disalurkan sebagai kredit untuk pembangunan di daerah bersangkutan, melainkan disalurkan sebagai kredit untuk pembangunan di daerah lain.

Kekhawatiran akan semakin sulitnya sumber pembiayaan pembangunan di daerah kemudian melahirkan berbagai pemikiran untuk mengoptimalkan seluruh *resources* khususnya sumber dana. Salah satu pemikiran yang berkembang dan dapat dikatakan pemikiran ekstrim adalah pemikiran untuk membatasi aliran dana termasuk dana perbankan di daerah. Walaupun pemikiran ini dapat dikatakan ekstrim dan hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan, tetapi setidaknya pemikiran ini merupakan cerminan bahwa daerah telah menempatkan perbankan sebagai sumber pembiayaan yang sangat vital bagi pembangunan di daerah. Seiring dengan implementasi otonomi daerah maka untuk mendukung pembiayaan pembangunan di daerah perlu adanya perubahan sistem perbankan dari *branch banking system* yang sifatnya tersentralisasi ke *unit banking system* yang bersifat lebih otonom.

Apabila fungsi intermediasi perbankan efektif maka dapat mendorong sektor riil. Hal ini dapat tercermin dari Loan to Deposit Rasio

(LDR) perbankan, melalui penyaluran kredit investasi dan kredit modal kerja. Dan sebaliknya apabila fungsi intermediasi perbankan tidak efektif maka sector rill sulit berkembang.

Berkaitan dengan upaya untuk mengatasi seluruh permasalahan perbankan di daerah tersebut diatas, dugaan terjadinya "*capital flight*" di daerah harus dapat dijawab dengan tuntas. Dalam hal ini, harus dapat dibuktikan apakah "*capital flight*" tersebut benar-benar terjadi atau mungkin hal itu hanya fenomena umum yang terjadi secara nasional, sehubungan dengan masih berlangsungnya krisis perbankan di Indonesia. Selanjutnya bila "*capital flight*" itu benar-benar terjadi maka pertanyaannya yang kemudian juga harus dijawab adalah factor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya. Apakah "*capital flight*" tersebut terkait dengan ketidak mampuan perbankan mencari peluang usaha yang dapat dibiayai atau lebih disebabkan oleh rendahnya permintaan kredit oleh perusahaan-perusahaan di daerah atau rendahnya penyaluran kredit di daerah yang kemudian menyebabkan pelarian dana dari suatu daerah ke daerah lain lebih disebabkan oleh minimnya kewenangan kantor-kantor bank di daerah untuk menyalurkan kredit atau sektor swasta yang kurang kreatif mengembangkan sektor usaha.

Seiring dengan tantangan yang semakin berat itu, sektor perbankan Indonesia dituntut untuk dapat meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya agar dapat terus bertahan.

Berdasarkan pemikiran dan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu *“Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Intermediasi Perbankan di Sulawesi Selatan”*.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah pokok yang penulis telaah yaitu *“Sejauhmana tingkat efektivitas perkembangan fungsi intermediasi sektor perbankan pemerintah dan swasta nasional di Sul-Sel .*

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. *Tujuan penelitian adalah :*

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran atas pelaksanaan otonomi daerah dari sisi perbankan sebagai upaya untuk memperkaya khasanah penelitian tentang ekonomi daerah/regional.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di daerah. Pengukuran ini sekaligus untuk membuktikan kebenaran terjadinya *“capital flight”* dari suatu daerah ke daerah lainnya.

b. *Manfaat penelitian adalah :*

1. Memberikan masukan untuk mengatasi distorsi yang menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di daerah.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi setiap mahasiswa dan memperkaya khasanah penelitian tentang perbankan khususnya mengenai fungsi intermediasi perbankan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penguraian dan pembahasan dalam skripsi ini maka sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan kerangka teoritis yang menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang membahas tentang objek dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis.



BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan meliputi penyajian hasil analisa.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai masukan bagi perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank

Secara empiris, keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Kalau dahulu masyarakat masih dapat menyimpan uang di bawah bantal atau dalam sebuah celengan yang terbuat dari gerabah, saat ini masyarakat akan lebih senang menyimpan uang di bank, karena uang tersebut dapat menghasilkan bunga dan lebih aman. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan dana akan lebih mudah datang ke bank daripada mencari orang yang dapat dan mau meminjamkan dana kepada yang memerlukan.

2.1.1. Pengertian Bank

Suseno (2003:3) menjelaskan bahwa Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.

Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat.

Susidarto (2000;3) menggambarkan bank sebagai suatu lembaga keuangan yaitu suatu badan usaha yang berfungsi sebagai financial intermediary, atau perantara keuangan antara 2 (dua) pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lebih lanjut lagi, Sinungan mendefinisikan bank sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dalam masyarakat.

Sementara itu, dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 2. dituliskan definisi bank sebagai, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Sementara itu masih dalam Undang-undang yang sama menjelaskan pengertian Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang

dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Kantor cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.

Lebih jauh lagi, dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998 tersebut dijelaskan bahwa "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Sedangkan menurut Hasibuan (2002:2) Bank Umum adalah Lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpulan dana masyarakat dan penyaluran kredit, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan logam) merupakan otoritas tunggal Bank Sentral (Bank Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan oleh bank umum.



Bank adalah pengumpul dana dan penyaluran kredit dalam operasinya bank mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Bank selaku pelaksana lalu lintas pembayaran berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau financial dari pembayar ke penerima.

Bank selaku stabilisator moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) bank, operasi pasar terbuka ataupun kebijakan diskonto.

Sedangkan bank selaku dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduksi tabungan, dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bertindak sebagai financial intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2. Laporan Keuangan Bank dan Fungsinya

Sebuah bank pada dasarnya adalah sebuah perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang menggambarkan tentang aktivitas financial perusahaan tersebut selama periode tertentu.

Mulyono (1992;3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah hasil dari proses akuntansi seni mencatat, mengklasifikasikan, melaporkan dalam bentuk laporan keuangan atas semua transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan dan akhirnya menginterpretasikan laporan tersebut. Sementara itu, Jusuf (1996;3) mendefenisikan laporan keuangan sebagai hasil dari proses pencatatan dalam bentuk ringkasan dari kondisi keuangan perusahaan.

Jusuf (1996;4) kemudian menjelaskan pula bahwa ada 5 (lima) tujuan diadakannya laporan keuangan yaitu:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

2.1.3. Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas aktivitas atau kinerja yang telah dicapai selama periode tertentu.

Jenis-jenis laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Komitmen dan Kontijensi, serta Laporan Aktiva Produktif.

2.2. Fungsi Intermediasi

2.2.1. Pengertian Fungsi Intermediasi

Secara umum bank dipahami sebagai Financial intermediary institution atau lembaga perantara keuangan dari dua pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Seperti yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun

1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk kredit. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang yang sama, usaha bank meliputi berbagai kegiatan termasuk kegiatan penyaluran dana yang tidak dalam bentuk kredit seperti membeli surat berharga, menempatkan dana kepada bank lain, atau juga kegiatan penyediaan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pengertian tentang fungsi intermediasi ini merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena fungsi intermediasi mencakup seluruh perbankan untuk melaksanakan seluruh kegiatan usahanya.

Miranda S Gultom (2002) dalam “Pemulihan Fungsi Intermediasi Perbankan: Upaya Revitalisasi Ekonomi”. menggambarkan fungsi intermediasi adalah fungsi bank sebagai lembaga perantara dimana dana yang dihimpun oleh perbankan dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito disalurkan kembali oleh perbankan dalam bentuk kredit.

Meskipun kegiatan usaha dari bank sangat beragam. akan tetapi fungsi utama dari bank tetap sebagai lembaga intermediasi dimana hal tersebut tercermin pada sumber terbesar pendapatan dari pendapatan bunga kredit yang diberikan.

Dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, bank telah menjembatani pihak-pihak yang

kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh bank, bank disebut sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi. Dalam perkembangan selanjutnya bank tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi tetapi juga memberikan jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat, seperti penyediaan jasa transfer.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Dalam proses intermediasi dana yang dikerahkan atau dimobilisasi oleh suatu bank selanjutnya akan disalurkan dan diinvestasikan ke sektor ekonomi produktif. Kegiatan bank ini tentu dapat meningkatkan investasi, produksi, serta konsumsi barang dan jasa yang berarti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi suatu daerah.

Melihat peran perbankan yang sangat strategis tersebut, maka kesehatan dan stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat vital. Bank yang sehat secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan kebutuhan suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesehatan dan stabilitas perbankan akan sangat berpengaruh terhadap pasang surut suatu perekonomian. Sebagai gambaran, dengan terganggunya fungsi intermediasi perbankan

mengakibatkan melambatnya kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Apabila fungsi intermediasi berjalan dengan baik, maka perekonomian secara keseluruhan juga memperoleh manfaat melalui mekanisme alokasi sumber-sumber dana kepada sektor produktif berupa tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

2.3. Efektivitas

2.3.1. Pengertian efektivitas

Apabila bank ingin tetap mempertahankan eksistensinya secara lebih baik, maka hal yang mendasar adalah kemampuan untuk mengelola potensi yang ada. Williams (2001:9) menyatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian tugas-tugas yang membantu pencapaian sasaran organisasi. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh organisasi.

2.4. Loan to Deposit Rasio

2.4.1. Pengertian Loan to Deposit Rasio

Berdasarkan kegiatan dan pendapatan utama bank maka setiap bank akan berupaya untuk meningkatkan penyaluran kreditnya dan untuk itu bank juga harus berupaya meningkatkan pengumpulan dana. Sekaligus

juga menunjukkan bahwa kinerja perbankan seharusnya diukur dari pelaksanaan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi, baik dalam hal penyaluran kredit maupun pengumpulan dana. Dengan kata lain, kurang tepat bila bank berfokus dari satu sisi, misalkan dari sisi penyaluran kredit atau hanya dari sisi pengumpulan dana.

Salah satu pendekatan yang digunakan mengukur kinerja perbankan khususnya berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi adalah menggunakan Loan to Deposit Rasio (LDR), yaitu rasio perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan. Dengan didasarkan pada rasio Loan to Deposit Rasio (LDR), berbagai pihak di daerah dapat mengetahui bahwa daerahnya mengalami "*capital flight*" atau tidak.

Dilihat dari komponen pembentuknya LDR terdiri dari komponen dana pihak ketiga dan kredit. Dimana rasio ini merupakan ukuran yang ideal untuk mengetahui kinerja perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Dalam membiayai kegiatannya bank memerlukan dana yang berasal dari masyarakat (DPK). Dana tersebut sangat penting untuk perencanaan kredit dan keputusan-keputusan manajemen untuk mencapai keuntungan. Pemenuhan kebutuhan dana bank dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dari bank itu sendiri dengan modal disetor (net worth), masyarakat, dan lembaga keuangan.

2.4.2. *Sumber Dana Bank*

Latumerissa (1996;4) menjelaskan bahwa sumber dana yang berasal dari masyarakat luas dapat berupa giro, tabungan dan deposito.

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.4.3. *Penggunaan Dana Bank*

Komponen berikutnya dari pelaksanaan fungsi intermediasi adalah kredit dimana Latumerissa (1996 : 16) menggambarkan pengertian dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sementara Mulyono (1993:10) mendefenisikan kredit yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu



pinjaman dengan suatu pembayaran akan dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.

Raymon P. Kent yang dikutip oleh Suyatno (1995:13) mengemukakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Unsur-unsur kredit

Dalam kata kredit yang mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan

Tujuan dan fungsi Kredit

Pemberian fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah.

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama pada sektor riil.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu Wilayah ke Wilayah yang lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu Wilayah ke Wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu Wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Prinsip-prinsip Kredit

Pada teori ekonomi moneter, dikenal beberapa macam prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, antara lain :

1. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

2. Capacity



Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba/rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

4. Condition of economic

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial politik yang ada sekarang dan prediksi untuk yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit ini jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

c. Kredit dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

d. Kredit dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu

Jenis-jenis Kredit.

a. Kredit dilihat dari segi tujuannya

1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b. Kredit dilihat dari jangka waktu

1. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit ini jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

c. Kredit dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

d. Kredit dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu

jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e. Kredit dilihat dari sektor usaha

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor usaha perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar.
4. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
7. Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ekspansi Kredit

Dalam membuat rencana kredit, bank perlu memperhatikan faktor-faktor intern atau ekstern yang dapat mempengaruhi kemampuan bank melakukan ekspansi kredit.

Adapun faktor yang membatasi perkembangan kredit bank adalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern
 - a. Kemampuan permodalan.
 - b. Tenaga yang berpengalaman.
2. Faktor Ekstern

- a. Kebijakan Moneter.

Kebijakan moneter pemerintah yang dapat membatasi perkembangan kredit bank antara lain:

1. Cadangan atau likuiditas wajib minimum.
2. Operasi pasar terbuka terutama untuk tujuan tight money policy atau kebijakan uang ketat.

3. Penetapan pagu kredit perbankan.
4. Tingkat bunga diskonto.

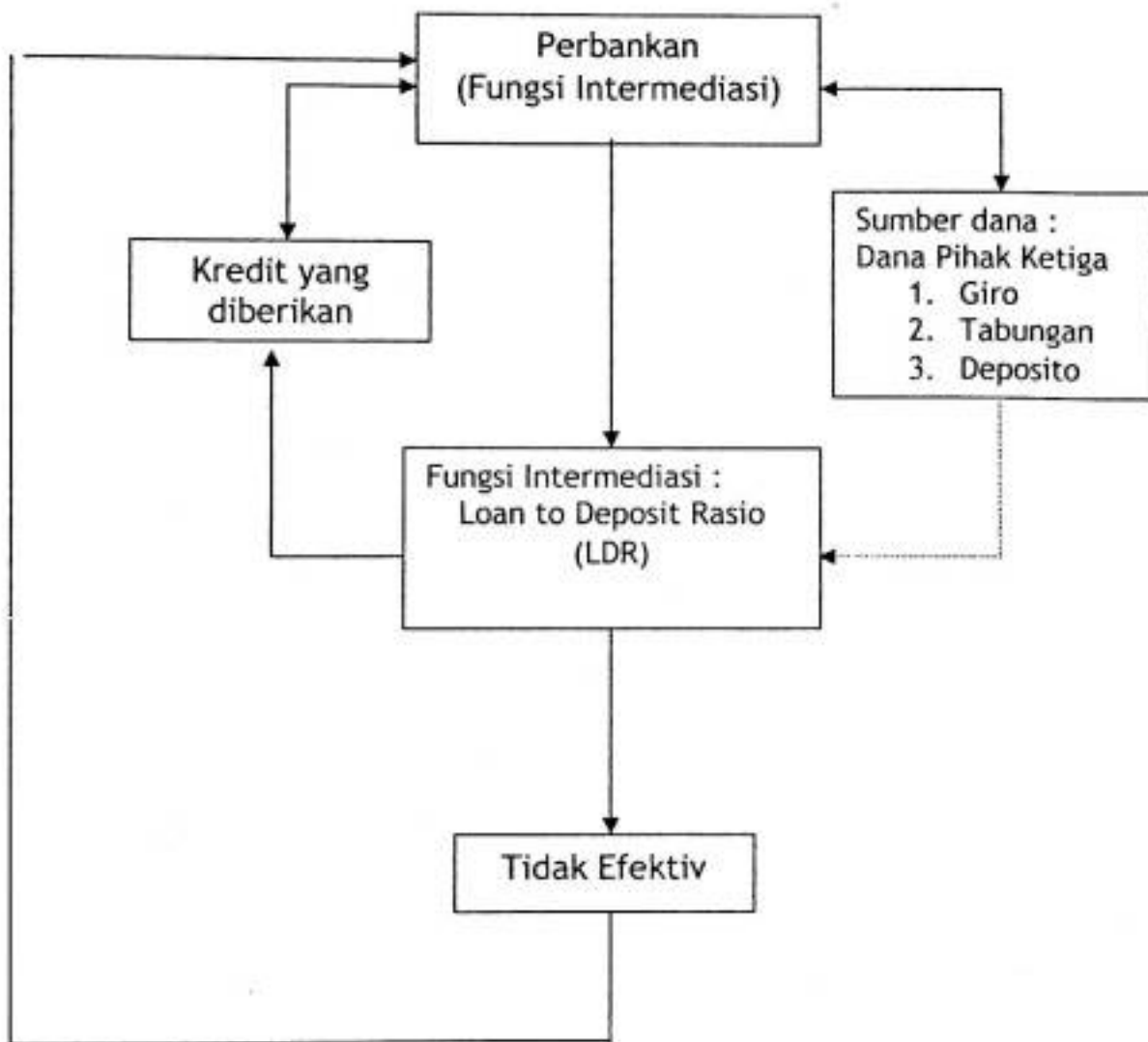
b. Situasi perekonomian secara umum.

Dalam situasi siklus ekonomi atau *business cycle* mengalami penurunan dan kelesuan sulit bagi bank melakukan ekspansi kredit. Dalam situasi seperti ini daya serap pasar relatif terbatas.

Dalam kaitannya dengan fungsi intermediasi, perbankan sangat erat hubungannya dengan nasabah. Dimana fungsi intermediasi mempunyai peranan yang sangat penting karena hubungan yang langsung dengan nasabah dan aktivitas hubungannya dapat ditingkatkan berupa pemberian fasilitas kredit mengikuti serta mengamati penggunaan fasilitas yang dipercayakan padanya dengan tujuan agar penarikan/penggunaan fasilitas berlangsung sesuai dengan tujuan serta syarat yang disepakati sebagaimana tertuang dalam akad perjanjian kredit.

Dengan didasarkan pada komponen pembentuknya maka LDR dapat diartikan sebagai suatu indikator untuk mengukur atau membandingkan 2 (dua) komponen neraca yaitu Loans (pinjaman) disisi aktiva dan Dana yang diterima disisi pasiva. yang terdiri dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.

2.5. KERANGKA PIKIR



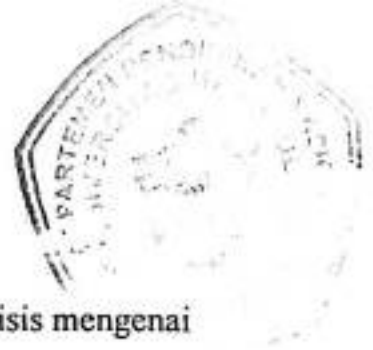
Keterangan :

Perbankan adalah merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dalam menyimpan dananya dan penyalurannya dengan aman dan terjamin kerahasiannya.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali kemasyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan.
2. nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil bergantung dari besar dan kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai dengan hukum islam.

Untuk itu, perbankan setiap tahunnya mengeluarkan laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat mengenai kondisi bank yang bersangkutan.



Terhadap laporan keuangan tersebut, penulis melakukan analisis mengenai pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan dengan menggunakan alat analisis yaitu rasio LDR (Loan to Deposit Rasio). Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan fungsi intermediasi yang dilakukan oleh perbankan pasca krisis perbankan yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Seluruh hasil dari perhitungan tersebut, kemudian diberikan penilaian untuk mengetahui tingkat pelaksanaan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi (perantara) dan mitra pemerintah dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya Makassar, kemudian menarik kesimpulan mengenai penilaian tersebut.

2.6. HIPOTESIS

Selubungan dengan tinjauan pustaka dan masalah yang dikemukakan, maka penulis memberikan hipotesis atas masalah tersebut yaitu :

“Diduga perkembangan fungsi intermediasi sektor perbankan pemerintah dan swasta nasional di Sul-Sel belum efektif”

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. OBJEK DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Untuk mengumpulkan data-data guna penyusunan/penulisan skripsi selanjutnya yang menjadi objek penelitian penulis adalah efektivitas pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di Sulsel

2. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada Kantor Bank Indonesia Makassar JL. Jend. Sudirman No.3 Makassar 90113

3.2. JENIS DAN SUMBER DATA

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa:

1. Data kuantitatif, yaitu data-data yang berasal dari seluruh perbankan di Sulsel yang diperoleh dari data SEKDA (Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah) pada Kantor Bank Indonesia Makassar.
2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, karangan ilmiah, artikel, literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3.3. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk menunjang penulisan ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, karangan ilmiah, majalah dan koran. internet dan bahan yang diperoleh selama perkuliahan yang erat hubungannya dengan penulisan ini dan mendukung pokok pembahasan.

3.4. METODE ANALISIS

Untuk menguji hipotesis yang disajikan. maka analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif yang bersifat komparatif berdasarkan data kuantitatif yang berbasis pada laporan keuangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Rasio*)

Salah satu pendekatan dalam rangka mengukur kinerja perbankan khususnya berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi adalah dengan menggunakan *Loan to Deposit Rasio* (LDR), yaitu perbandingan atau rasio antara penyaluran dana dalam bentuk kredit (pelaksanaan fungsi penyaluran dana) terhadap rasio dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan (pelaksanaan fungsi intermediasi penghimpunan dana)

$$\text{Loan to Deposit Rasio} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dilihat dari komponen pembentuknya LDR merupakan suatu ukuran yang ideal yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan sebagai lembaga intermediasi.

3.5. BATASAN VARIABEL

Dalam penulisan variabel-variabel penulis membatasi variabel-variabel sebagai berikut:

1. Bank umum yang diteliti yaitu bank pemerintah dan bank swasta nasional di Sulsel, dengan melihat perkembangan dana pihak ketiga serta penyaluran kredit.
2. Efektifitas adalah berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh organisasi.
3. Intermediasi adalah perantara keuangan dari dua pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana .
4. LDR adalah rasio perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Perbankan

Pembangunan dibidang ekonomi bagi negara seperti Indonesia merupakan tulang punggung bagi pembangunan dibidang lainnya. Untuk menunjang proses pembangunan tersebut, pemerintah melalui otoritas moneternya telah mengeluarkan serangkaian kebijakan deregulasi dibidang perbankan. Kebijakan deregulasi ini, pada dasarnya ditujukan guna menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong dan merangsang dunia usaha yang dinamis, menggali potensi dan mengembangkan peluang-peluang usaha yang pada gilirannya dapat menciptakan peningkatan kegiatan perekonomian, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan perbankan dalam proses sesudah diadakannya kebijakan deregulasi, mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. pertumbuhan industri perbankan ini dapat diukur dari berbagai indikator seperti pertumbuhan jumlah bank, perkembangan jaringan bank, volume kredit yang disalurkan oleh perbankan dan volume dana yang berhasil dihimpun perbankan.

Implikasi dari kebijakan deregulasi tersebut dapat dilihat dari jumlah bank yang mengalami perkembangan. Dilihat dari kelompok bank dan kantor bank mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dilihat dari kelompok

bank, bank milik pemerintah (BUMN) yang terdiri dari tujuh buah bank tahun 1995 mengalami penurunan menjadi empat buah bank pada tahun 1999.

Tabel IV.1
Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sul-Sel
Tahun 1995-2004

Tahun	Bank Pemerintah		Bank Swasta Nasional		Total	
	Bank	Kantor	Bank	Kantor	Bank	Kantor
1995	7	75	26	81	33	156
1996	7	78	30	102	37	180
1997	7	82	34	117	41	199
1998	7	83	28	109	35	192
1999	4	84	21	90	25	174
2000	4	84	16	82	20	166
2001	4	86	17	82	21	168
2002	4	92	17	92	21	184
2003	4	98	17	96	21	194
2004	4	99	18	99	22	198

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar

. Namun pada tahun 1995 jumlah kantor bank pemerintah sebanyak 75 buah kantor terus mengalami peningkatan menjadi 84 pada tahun 1999. dan pada tahun 2004 jumlah kantor bank pemerintah juga mengalami peningkatan



menjadi 99 buah kantor. Kelompok bank swasta nasional mengalami kenaikan dari 26 buah bank dan 81 kantor bank.

Pada tahun 1995 menjadi 30 buah bank dan 102 kantor bank pada 1996.

Namun perkembangan perbankan tidak berjalan mulus akibat terjadinya krisis ekonomi yang meluas menjadi krisis perbankan dan berujung pada likuidasi bank. Peristiwa inilah yang menyebabkan jumlah bank dan kantor bank mengalami penurunan. Penurunan jumlah bank dan kantor bank sangat terlihat pada bank swasta nasional dari 30 buah bank dan 102 kantor bank pada tahun 1996 menjadi 21 bank dan 90 kantor bank pada tahun 1999.

Secara keseluruhan dalam tahun 1995 sampai tahun 2000 jumlah bank mengalami penurunan dari 33 buah bank menjadi 20 buah bank pada tahun 2000. sedangkan kantor bank sempat mengalami kenaikan dari 156 pada tahun 1995 menjadi 192 pada tahun 1998. tetapi kemudian menurun menjadi 166 pada tahun 2000. perkembangan kantor bank paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 1997 dengan 199 kantor bank.

4.2. Perkembangan dana pihak ketiga

Bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk mencari dan menghimpun dana. Hal ini sangat menentukan pertumbuhan bagi suatu bank sebab volume dana yang berhasil dihimpun akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh suatu bank dalam bentuk penanaman dana yang dihasilkan.

Dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Sul-Sel dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dalam tahun penelitian yaitu tahun 1995 sampai 2004, dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada tahun 1995 sebesar Rp 2.499.501 juta meningkat menjadi Rp 13.809312 juta pada tahun 2004.

Tabel IV.2
Perkembangan Dana Perbankan Menurut Kelompok Bank di Sul-Sel
Tahun 1995 – 2004 (Juta Rupiah)

Tahun	Giro	Pertum- buan(%)	Deposito	Pertum- buan(%)	Tabungan	Pertum- buan(%)
1995	477.244	-	795.718	-	1.226.539	-
1996	609.663	27,74	1.047.910	31,69	1.580.128	28.82
1997	705.030	15,64	1.226.106	17,00	1.773.839	12.25
1998	1.002.945	42,25	4.161.421	239,40	201.173	-88.65
1999	1.159.651	15,62	3.304.371	-20,59	3.479.574	1629.64
2000	1.414.960	22,01	3.240.569	-1,93	4.110.062	18.11
2001	1.994.834	40,98	3.870.283	19,43	4.728.220	51.04
2002	2.528.241	26,73	3.306.954	-14,55	5.377.771	13.73
2003	2.770.007	9,56	3.983.142	20,44	6.606.992	22.85
2004	2.779.709	0,35	3.586.195	-9,96	7.443.408	12.65

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan dana perbankan di Sul-Sel pada tahun 1995 sampai 2004 yang dapat dihimpun menurut kelompok bank. Pada tahun 1995 sebesar Rp 2.499.501 juta mengalami peningkatan menjadi Rp 13..809.312 juta pada tahun 2004.

Dengan rincian untuk dana giro secara umum mengalami pertumbuhan yang melambat. Untuk tahun 1995 dana giro yang berhasil dihimpun sebesar Rp 477.244 juta kemudian meningkat menjadi Rp 609.663 jtuta pada tahun 1996. dengan peningkatan yang cukup tinggi dengan persentase sebesar 27,74 %. Kemudian pada tahun 1997 meningkat menjadi Rp 705.034 juta dengan angka pertumbuhan sebesar 15,64 %. Persentase pertumbuhan pada tahun ini mengalami penurunan disbanding tahun-tahun sebelumnya akibat krisis moneter. Selanjutnya persentase pertumbuhan dana perbankan pada tahun 1998 mengalami peningkatan yang tinggi dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp 1.002.945 juta dengan persentase pertumbuhan sebesar 42,25 %. Kemudian pada tahun 1999 dana yang berhasil dihimpun meningkat menjadi Rp 1.159.651 juta dengan pertumbuhan 15,62 %, tidak sebesar dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Pada tahun 2001 dana yang berhasil dihimpun menunjukkan perkembangan yang cukup pesat menjadi Rp 1.994.834 juta dengan persentase pertumbuhan sebesar 40,98%. Terakhir pada tahun 2004 jumlah dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 2.779.709 juta dengan tingkat persentase pertumbuhan yang hanya mencapai 0,35%. tingkat pertumbuhan dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro yang paling besar terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 42,25%.

Jika dilihat dari deposito, dengan melihat 10 tahun terakhir terjadi perkembangan yang berfluktuasi. Ini dapat dilihat pada tahun 1995 jumlah dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk deposito sebesar Rp 795.718 juta.

Dengan rincian untuk dana giro secara umum mengalami pertumbuhan yang melambat. Untuk tahun 1995 dana giro yang berhasil dihimpun sebesar Rp 477.244 juta kemudian meningkat menjadi Rp 609.663 juta pada tahun 1996. dengan peningkatan yang cukup tinggi dengan persentase sebesar 27,74 %. Kemudian pada tahun 1997 meningkat menjadi Rp 705.034 juta dengan angka pertumbuhan sebesar 15,64 %. Persentase pertumbuhan pada tahun ini mengalami penurunan disbanding tahun-tahun sebelumnya akibat krisis moneter. Selanjutnya persentase pertumbuhan dana perbankan pada tahun 1998 mengalami peningkatan yang tinggi dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp 1.002.945 juta dengan persentase pertumbuhan sebesar 42,25 %. Kemudian pada tahun 1999 dana yang berhasil dihimpun meningkat menjadi Rp 1.159.651 juta dengan pertumbuhan 15,62 %, tidak sebesar dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Pada tahun 2001 dana yang berhasil dihimpun menunjukkan perkembangan yang cukup pesat menjadi Rp 1.994.834 juta dengan persentase pertumbuhan sebesar 40,98%. Terakhir pada tahun 2004 jumlah dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 2.779.709 juta dengan tingkat persentase pertumbuhan yang hanya mencapai 0,35%. tingkat pertumbuhan dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro yang paling besar terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 42,25%.

Jika dilihat dari deposito. dengan melihat 10 tahun terakhir terjadi perkembangan yang berfluktuasi. Ini dapat dilihat pada tahun 1995 jumlah dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk deposito sebesar Rp 795.718 juta.

kemudian pada tahun 1996 meningkat sebesar Rp 1.047.910 juta dengan tingkat persentase pertumbuhan sebesar 31,69%. Selanjutnya pada tahun 1997 dana yang dapat dihimpun sebesar Rp 4.226.106 juta, akan tetapi pertumbuhannya tidak sebesar tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17%. Kemudian pada tahun 1998 dana yang berhasil dihimpun mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebesar 239,40% dengan jumlah dana sebesar Rp 4.161.421 juta, hal ini disebabkan Karena tingkat suku bunga penjaminan pada tahun 1998 sangat tinggi sehingga merangsang masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito. Pada tahun 1998 merupakan peningkatan deposito yang paling besar. Namun peningkatan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1999 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, sehingga dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk deposito pada tahun 1999 mengalami penurunan yaitu -20,59%, dengan jumlah dana Rp 3.304.371 juta, dan pada tahun 2001 dana yang berhasil dihimpun kembali mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 19,43%. dengan jumlah dana sebesar Rp 3.870.283 juta. Dan pada tahun 2002 kembali mengalami penurunan dengan persentase sebesar -14,55%, dengan jumlah dana yang dapat dihimpun hanya sebesar Rp 3.306.954 juta. ini dikarenakan suku bunga penjaminan mengalami penurunan. Pada tahun 2003 kembali terjadi peningkatan, dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 3.983.142 juta. dengan persentase pertumbuhan 20,44%, ini dikarenakan suku bunga penjaminan meningkat.

Kemudian pada tahun terakhir dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk deposito mengalami penurunan sebesar -9,96%, dengan jumlah dana Rp 3.586.195 juta, hal ini dikarenakan adanya kecenderungan masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan yang dapat segera ditarik.

Dilihat dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan dari tahun ketahun mengalami peningkatan walaupun angka persentase pertumbuhannya berfluktuasi. Pada tahun 1995 dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 1.226.539 juta, kemudian meningkat pada tahun 1996 sebesar Rp 1.580.128 juta, dengan tingkat persentase pertumbuhan sebesar 28,82%. Pada tahun 1998 dana yang dihimpun dalam bentuk tabungan mengalami penurunan sebesar -88,65%, dengan jumlah dana hanya sebesar Rp 201.173 juta, hal ini dikarenakan karena kecenderungan masyarakat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito karena bunga penjaminan sangat tinggi. Pada tahun 1999 dana masyarakat dalam bentuk tabungan meningkat sebesar Rp 347.957 juta, dengan persentase pertumbuhan 1629,64%, ini disebabkan tingkat bunga tabungan tinggi dan kecenderungan masyarakat menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Pada tahun 2004 dana yang dihimpun mengalami peningkatan sebesar Rp 7.443.408 juta, akan tetapi persentase pertumbuhannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari kelompok pemilikan bank (table 4) bank milik pemerintah telah memberikan andil yang cukup besar dalam menghimpun

dana masyarakat, dimana dana yang berhasil dihimpun dari kelompok bank pemerintah sebesar Rp 1.375.809 juta, pada tahun 1995 menjadi Rp 8.597.674 juta pada tahun 2004. peningkatan yang paling tinggi sebesar Rp 4.357.707 juta pada tahun 1998, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.198.099 juta, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 98,24%.

Tabel IV.3

**Perkembangan Dana Perbankan Menurut Kelompok Bank di Sul-Sel
Tahun 1995 – 2004 (Juta Rupiah)**

Tahun	Bank Pemerintah		Bank Swasta Nasional		Total	
	Nilai	Pertumbuhan(%)	Nilai	Pertumbuhan(%)	Nilai	Pertumbuhan(%)
1995	1.375.809	-	1.123.692	-	2.499.501	-
1996	1.706.325	24,02	1.531.376	36,28	3.237.701	29,53
1997	2.198.099	28,82	1.506.880	-1,59	3.704.979	14,43
1998	4.357.707	98,24	2.897.830	92,30	7.255.537	95,83
1999	4.570.234	4,87	3.373.362	16,40	7.943.596	9,48
2000	5.178.498	13,30	3.587.093	6,33	8.765.591	10,34
2001	6.674.473	28,88	3.918.864	9,24	10.593.337	20,85
2002	7.400.254	10,87	3.812.712	-2,70	11.212.966	5,84
2003	8.567.487	15,77	4.792.654	25,70	13.360.141	19,14
2004	8.597.674	0,35	5.211.638	8,74	13.809.312	3,36

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar (data diolah)

Untuk kelompok bank swasta nasional dana yang berhasil dihimpun menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Jika ditinjau dari pertumbuhan dana masyarakat yang berhasil dihimpun memperlihatkan pertumbuhan yang melambat. Pada tahun 1995 dana yang dihimpun sebesar Rp 1.123.692 juta.

meningkat menjadi Rp 1.531. 376 juta, dengan persentase pertumbuhan 36,28%, pada tahun 1997 dana yang dihimpun sebesar Rp 1.506.880 juta dengan pertumbuhan -1,59%, pada tahun 1998 dana yang dihimpun mengalami pertumbuhan yang paling tinggi selama periode 1995-2004 dengan pertumbuhan 92,30%. Kemudian pada tahun 2002 dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 3.812.712 juta, dengan pertumbuhan -2,70%, dimana tingkat pertumbuhan ini yang paling rendah selama periode 1995-2004. kemudian pada tahun terakhir sempat meningkat tetapi kemudian turun kembali masing-masing sebesar 25,70% dan 8,74% pada tahun 2003-2004. pertumbuhan melambat karena terjadinya penurunan suku bunga perbankan.

Jika dilihat dari kelompok bank, bank pemerintah lebih besar andilnya dibanding bank swasta nasional dalam menghimpun dana, hal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan, tingkat keamanan bank pemerintah lebih besar dibanding bank swasta nasional.

4.3. Perkembangan Penyaluran Kredit

Kredit perbankan yang merupakan pangsa terbesar dalam penyaluran dana perbankan mengalami perkembangan yang melambat. Pertumbuhan kredit di Sulsel selama periode penelitian yaitu tahun 1995-2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.836.067 juta pada tahun 1995 menjadi Rp 13.793.791 juta pada tahun 2004.

Tabel IV.4
Perkembangan Kredit Perbankan Menurut Kelompok Bank di Sul-Sel
Tahun 1995 – 2004 (Juta Rupiah)

Tahun	Bank Pemerintah		Bank Swasta Nasional		Total	
	Nilai	Pertumbuhan(%)	Nilai	Pertumbuhan(%)	Nilai	Pertumbuhan(%)
1995	1.816.298	-	1.019.769	-	2.836.067	-
1996	2.409.017	32,63	1.151.612	12,92	3.560.629	25,54
1997	3.072.298	27,53	1.165.745	1,22	4.238.043	19,02
1998	3.342.192	8,78	1.075.181	-7,76	4.417.373	4,23
1999	3.055.756	-8,57	580.562	-46,00	3.636.318	-17,68
2000	3.796.855	24,25	1.063.330	83,15	4.860.185	33,65
2001	4.559.237	20,07	1.472.918	38,51	6.032.155	24,11
2002	7.070.032	55,07	2.337.413	58,69	9.407.445	55,95
2003	8.197.097	15,94	3.440.135	47,17	11.637.232	23,70
2004	9.517.669	16,11	4.276.122	24,30	13.793.791	18,53

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar (data diolah)

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank pemerintah pada tahun 1995 sebesar Rp 1.816.298 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 2.049.017 juta dengan persentase pertumbuhan sebesar 32,63%. Kemudian pada tahun 1998 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.342.192 juta dengan pertumbuhan yang melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,87%. Kemudian pada tahun 1999 kredit bank pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp 3.055.756 juta dengan pertumbuhan sebesar -8,57%, ini dikarenakan krisis ekonomi yang menyebabakan pembekuan usaha beberapa bank dan adanya pengalihan kredit

bermasalah ke Asset Mangement Unit (AMU) / Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).


Kemudian pada tahun 2000 kredit mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar Rp 3.796.855 juta dengan pertumbuhan sebesar 24,25%. Pertumbuhan kredit yang paling tinggi yaitu pada tahun 2002 sebesar Rp 7.070.032 juta dengan tingkat pertumbuhan sebesar 55,07%. Untuk bank swasta nasional kredit yang disalurkan pada tahun 1995 sebesar Rp 1.019.769 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 1.151.612 juta dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,92%. Pada tahun 1998 kredit bank swasta mengalami penurunan sebesar Rp 1.075.181 juta dengan persentase -7,76%. Ini dikarenakan tingkat suku bunga deposito tinggi sehingga merangsang masyarakat untuk menabung dibank. Walaupun likuiditas bank sedikit longgar namun bank-bank masih menahan diri dalam ekspansi kredit karena khawatir menghadapi resiko yang lebih tinggi. Sehingga bank cenderung memupuk likuiditas, yang sementara ditanamkan dalam penanaman jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2002 kembali terjadi peningkatan sebesar Rp 1.063.330 juta dengan laju pertumbuhan 83,15%, pada tahun ini merupakan pertumbuhan kredit yang paling tinggi selama periode 1995-2004.

Tabel IV.5
Posisi Kredit Perbankan Menurut Penggunaannya di Sul-Sel
Tahun 1995 – 2004 (Juta Rupiah)

Tahun	Bank Pemerintah			Bank Swasta Nasional			Total
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	
1995	635.941	759.849	420.508	683.383	205.655	130.731	2.836.067
1996	789.944	992.271	626.802	764.679	222.987	163.946	3.560.629
1997	1.087.081	1.212.637	772.580	713.321	200.271	252.153	4.238.043
1998	1.313.635	1.278.692	749.865	682.408	175.365	217.408	4.417.373
1999	1.190.986	1.079.707	785.063	418.415	107.512	54.635	3.636.318
2000	1.292.874	1.535.149	968.832	695.917	175.934	191.470	4.860.185
2001	1.518.975	1.731.480	1.308.782	729.218	281.027	462.673	6.032.155
2002	1.883.303	3.478.944	1.707.785	1.254.476	423.445	659.492	9.407.445
2003	2.296.434	3.634.698	2.265.965	1.671.192	754.225	1.014.718	11.637.232
2004	3.113.946	3.422.851	2.980.872	2.078.976	695.644	1.501.502	13.793.791

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa posisi kredit menurut penggunaannya bank pemerintah secara umum mengucurkan kredit lebih besar untuk kredit investasi kemudian kredit modal kerja dan selanjutnya untuk kredit konsumsi. Untuk kredit modal kerja dari tahun 1995-2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 1995 sebesar Rp 635.941 juta dan tahun 2004 sebesar Rp 3.113.946 juta. Selanjutnya kredit untuk investasi juga mengalami peningkatan dari tahun 1995-2004. pada tahun 1995 kredit investasi sebesar Rp 759.849 juta meningkat menjadi Rp 3.422.851 juta pada tahun 2004. kemudian untuk kredit konsumsi juga mengalami peningkatan



dari tahun 1995-2004. pada tahun 1995 kredit konsumsi sebesar Rp 420.508 juta meningkat menjadi Rp 2.980.872 pada tahun 2004. jika dilihat secara umum kredit investasi, modal kerja dan konsumsi pada tahun 1999 mengalami penurunan sebesar Rp 122.649 juta, untuk kredit modal kerja, Rp 198.985 juta untuk kredit investasi dan Rp 22.715 juta untuk kredit konsumsi pada bank pemerintah.

Untuk bank swasta nasional kredit menurut penggunaannya lebih besar digunakan untuk kredit modal kerja, kemudian untuk kredit konsumsi selanjutnya untuk kredit investasi.

Kredit untuk modal kerja dari tahun 1995-2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 1995 kredit modal kerja sebesar Rp 683.383 juta meningkat menjadi Rp 2.078.976 juta pada tahun 2004. kredit investasi juga meningkat dari tahun 1995-2004 akan tetapi peningkatannya sangat lambat, kredit untuk konsumsi juga mengalami peningkatan dari tahun 1995-2004. pada tahun 1995 kredit konsumsi sebesar Rp 130.731 juta, meningkat menjadi Rp 1.501.502 juta pada tahun 2004. laju pertumbuhan kredit konsumsi pada bank swasta nasional yang paling tinggi terjadi pada tahun 2003.

Secara keseluruhan baik untuk bank pemerintah maupun untuk bank swasta nasional, posisi kredit menurut penggunaannya baik untuk kredit modal kerja, kredit investasi dan konsumsi dari tahun 1995-2004 terus meningkat. Akan tetapi dari tahun 2003-2004 kredit investasi baik bank

pemerintah maupun bank swasta nasional mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga kredit investasi sangat tinggi.

Fakta dilapangan perbankan nasional beramai-ramai memberikan kredit ke sektor konsumsi. Kondisi ini sebenarnya perlu diwaspadai. Sebab kalau tidak, kredit konsumsi bisa menjadi masalah bagi NPL perbankan nasional, tapi disisi lain perbankan nasional tidak juga dapat disalahkan begitu saja sebab sector rill belum benar-benar siap menyerap kredit yang telah disiapkan oleh perbankan nasional. Jadi bagi perbankan nasional kredit konsumsi seperti pilihan yang terpaksa ketika sector rill belum sembuh benar. Pada dasarnya bank tidak bisa menggerakkan sector rill kalau sector rill tidak bergerak sendiri, bank hanya mengikuti. Kalau sector rill sudah bergerak, maka dengan sendirinya akan membutuhkan kredit. Sebelum sector rill bergerak, maka bank lebih focus pada kredit konsumsi, karena dana perbankan menganggur kalau tidak ditempatkan.

4.4. Loan To Deposit Ratio (LDR)

Loan to deposit ratio adalah rasio antara besarnya volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari masyarakat. Loan to deposit ratio merupakan salah satu factor untuk mengukur efektifitas intermediasi perbankan.

Loan to deposit ratio menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali panarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit oleh nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

Model analisis yang di gunakan untuk menghitung loan to deposit ratio (LDR) adalah:

$$\text{Loan to Deposit Rasio} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Dibawah ini adalah hasil perhitungan Loan to Deposit Rasio Bank pemerintah di Sul-Sel berdasarkan data periode 1995-2004.

Tabel IV.6
Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR)
Bank Pemerintah di Sul-Sel
Tahun 1995 – 2004 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Kredit	Dana pihak ketiga	LDR
1	1995	1.816.298	1.375.809	132,61%
2	1996	2.409.017	1.706.325	141,18%
3	1997	3.072.298	2.198.099	139,77%
4	1998	3.342.192	4.357.707	76,69 %
5	1999	3.055.756	4.570.234	66,86 %
6	2000	3.796.855	5.178.498	73,31 %
7	2001	4.559.237	6.674.473	68,30 %
8	2002	7.070.032	7.400.254	95,53 %
9	2003	8.197.097	8.567.487	95,67 %
10	2004	9.517.669	8.597.674	110,70%

Sumber: Kantor Bank Indonesia Makassar (data diolah)

Contoh perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR):
 Tahun 1995

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{1.816.298}{1.375.809} \times 100\% = 132,01\%$$

Pada awal periode penelitian LDR bank pemerintah di Sul-Sel menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 132,01%. Pada tahun tersebut kredit yang disalurkan Rp 1.816.298 juta. Kemudian LDR

perbankan mengalami penurunan menjadi 76,69% pada tahun 1998. Penurunan LDR perbankan ini disebabkan melemahnya kegiatan usaha seperti tercermin pada lambatnya laju ekspansi kredit. Hal tersebut berkaitan dengan lesunya kegiatan perekonomian dan diperburuk oleh masih berlangsungnya proses konsolidasi perbankan dalam memenuhi ketentuan kehati-hatian. Penyelesaian proses konsolidasi telah membebani banyak bank dan mendorong perbankan untuk mengurangi kegiatan pemberian kredit agar kesenjangan yang telah cukup besar antara kondisi keuangan dan manajemen dengan ukuran-ukuran kesehatan yang diberlakukan dapat dikurangi.

Pada tahun 1999 LDR bank pemerintah kembali mengalami penurunan menjadi 66,86%. Hal ini disebabkan masih lesunya perekonomian akibat terjadinya krisis. Kondisi perbankan berjalan lambat karena kompleks dan besarnya skala permasalahan yang dihadapi sebagai akibat parahnya ketidakseimbangan neraca disektor perbankan dan banyaknya bank yang bermasalah.

Kondisi bank pemerintah pada tahun 2000 dan 2001 telah menunjukkan perkembangan kearah perbaikan, meskipun masih mengalami tahapan-tahapan yang sulit dalam rangka konsolidasi dan menyeimbangkan posisi keuangan. Sekalipun telah menunjukkan perkembangan yang membaik, perbankan nasional belum berhasil menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi. Kondisi ini tercermin dari besarnya kelebihan

dana yang dimiliki/kelebihan likuiditas pada perbankan. Sementara penyaluran kredit kepada dunia usaha masih sangat terbatas atau tidak optimal, sehingga mobilisasi dana masyarakat lebih banyak ditanamkan dalam bentuk pinjaman antar bank dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Belum optimalnya perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi adalah masih banyaknya bank rekap yang hidupnya ditunjang obligasi rekap. Selain itu tidak adanya Lembaga Penjamin Kredit (LPK) sebagai penengah antara perbankan dan sektor riil. Karena itu, LPK ini harus dimunculkan agar LDR perbankan semakin meningkat.

Kemudian tiga tahun terakhir yaitu tahun 2002, 2003 dan 2004 kondisi perbankan sudah menunjukkan perkembangan yang tinggi. Hal ini dapat ditandai dengan tingginya LDR bank pemerintah. LDR bank pemerintah pada tahun 2002 yaitu sebesar 95,53% meningkat menjadi 95,67% pada tahun 2003 dan 110,70% pada tahun 2004. Ini berarti bahwa fungsi intermediasi perbankan pada tiga tahun terakhir sudah efektif. Peningkatan LDR perbankan ini disebabkan karena kredit yang disalurkan meningkat. Perkembangan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan semakin mantapnya proses konsolidasi dan membaiknya kualitas aktiva produktif. Dan juga adanya kelonggaran-kelonggaran NPL kepada perbankan yang diberikan oleh BI yang menyangkut kredit disektor pertanian dan kelautan yang dijadikan sector unggulan.

Perkembangan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi nasional dan semakin mantapnya proses konsolidasi yang disertai pula dengan membaiknya Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Disatu sisi, pesatnya perkembangan usaha tersebut terutama pemberian kredit, telah mampu meningkatkan kinerja perbankan. Namun disisi lain pertumbuhan kredit yang relative tinggi meningkatkan resiko yang dihadapi perbankan dan mendorong memanasnya suhu perekonomian.

Dibawah ini adalah hasil perhitungan Loan to Deposit Rasio Bank Swasta Nasional di Sul-Sel berdasarkan data periode 1995-2004.

Tabel IV.7
Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR)
Bank Swasta Nasional di Sul-Sel
Tahun 1995 – 2004 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Kredit	Dana pihak ketiga	LDR
1	1995	1.019.769	1.123.692	90,75%
2	1996	1.151.612	1.531.376	75,20%
3	1997	1.165.745	1.506.880	77,36%
4	1998	1.075.181	2.897.830	37,10%
5	1999	580.562	3.373.362	17,21%
6	2000	1.063.330	3.587.093	29,64%
7	2001	1.472.918	3.918.864	37,58%
8	2002	2.337.413	3.812.712	61,30%
9	2003	3.440.135	4.792.654	71,77%
10	2004	4.276.122	5.211.638	82,04%

Sumber: Kantor Bank Indonesia Makassar (data diolah)

Contoh perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR):
Tahun 1995

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{1.019.769}{1.123.692} \times 100\% = 90,75\%$$

Pada awal periode penelitian LDR bank swasta nasional di Sul-Sel menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 90,75%. Pada tahun tersebut kredit yang disalurkan Rp 1.019.769 juta. Kemudian LDR perbankan mengalami penurunan menjadi 75,20% pada tahun 1996. Penurunan LDR perbankan ini disebabkan melemahnya kegiatan usaha seperti tercermin pada lambatnya laju ekspansi kredit. Hal tersebut berkaitan dengan lesunya kegiatan perekonomian dan diperburuk oleh masih berlangsungnya proses konsolidasi perbankan dalam memenuhi ketentuan kehati-hatian. Penyelesaian proses konsolidasi telah membebani banyak bank dan mendorong perbankan untuk mengurangi kegiatan pemberian kredit agar kesenjangan yang telah cukup besar antara kondisi keuangan dan manajemen dengan ukuran-ukuran kesehatan yang diberlakukan dapat dikurangi.

Pada tahun 1999 LDR bank swasta nasional kembali mengalami penurunan menjadi 17,21%. Pada tahun ini juga merupakan LDR bank swasta nasional yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank swasta nasional tidak berjalan.

Kemudian dua tahun terakhir yaitu tahun 2003 dan 2004 kondisi perbankan sudah menunjukkan perkembangan yang tinggi. Hal ini dapat ditandai dengan tingginya LDR bank swasta nasional. LDR bank swasta nasional pada tahun 2003 yaitu sebesar 71,77% meningkat menjadi 82,04% pada tahun 2004. Perkembangan LDR bank swasta nasional ini tidak sebesar dengan perkembangan LDR bank pemerintah. Ini dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah jauh lebih besar.

Secara keseluruhan baik bank pemerintah dan bank swasta nasional pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2003 dan 2004 LDR nya mengalami peningkatan yang tinggi. Hal ini berarti pada tahun tersebut fungsi intermediasi perbankan terlaksana dengan baik.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan :

1. Perkembangan jumlah bank selama periode tahun penelitian yaitu mengalami penurunan dari 33 buah bank pada tahun 1995 menjadi 22 buah bank pada tahun 2004. Bank pemerintah mengalami penurunan dari 7 buah bank pada tahun 1995 menjadi 4 buah bank pada tahun 2004. Bank swasta nasional mengalami penurunan dari 26 buah bank pada tahun 1995 menjadi 18 buah bank pada tahun 2004.
2. Dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan memperlihatkan peningkatan selama tahun penelitian. Pada tahun 1995 dana masyarakat yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 2.499.501 juta meningkat menjadi Rp 13.809.312 juta pada tahun 2004.
3. Perkembangan kredit selama periode penelitian mengalami peningkatan. pada tahun 1995 kredit yang disalurkan sebesar Rp 2.836.067 juta meningkat menjadi Rp 13.793.791 juta pada tahun 2004.
4. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Loan to Deposit Rasio, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di Sul-Sel sudah efektif ini didasarkan pada pertumbuhan LDR



di Sul-Sel yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa perbankan di Sul-Sel berusaha untuk membantu kelompok usaha yang berada di Sul-Sel.

1.2 SARAN

Sesuai butir-butir kesimpulan penelitian diatas, dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan di daerah. hal-hal yang disarankan untuk dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tetap mengupayakan agar perbankan dapat melaksanakan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dengan jalan meningkatkan pengerahan dana masyarakat di daerah dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Namun demikian harus disadari bahwa penyaluran kredit perbankan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Peningkatan penyaluran kredit perbankan hanya dapat terjadi apabila permintaan kredit yang disertai kelayakan usaha di daerah cukup tinggi.
2. Menimbang bahwa permintaan kredit di daerah dipengaruhi oleh iklim dunia usaha di daerah secara keseluruhan. maka dalam rangka peningkatan penyaluran kredit perbankan peran pemerintah daerah sangat diharapkan. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan jaminan keamanan dan memberikan kemudahan birokrasi yang pada gilirannya akan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif. Pada akhirnya iklim dunia usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan aktivitas

usaha yang berarti meningkatkan investasi, sekaligus akan meningkatkan permintaan kredit perbankan.

3. Meskipun desentralisasi perbankan dalam bentuk perubahan system dari *branch banking system* ke *unit banking system* diperkirakan akan cukup mempengaruhi tingkat tingkat penyaluran kredit perbankan di daerah, namun disarankan untuk tidak diterapkan secara tergesa-gesa. Penerapan desentralisasi perbankan hanya dengan tujuan meningkatkan penyaluran kredit perbankan di daerah dikhawatirkan akan mendorong perbankan di daerah meninggalkan prinsip kehati-hatian yang pada gilirannya akan membahayakan industri perbankan secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, usulan penerapan desentralisasi perbankan sebaiknya ditangguhkan agar tidak menjadi distorsi dari upaya penyehatan perbankan nasional yang saat ini tengah berlangsung.
4. Sebaiknya Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor pertanian dan kelautan yang akan dijadikan sektor unggulan, misalnya. Yaitu memberikan kelonggaran NVL pada sektor tersebut, dengan demikian bank akan berlomba-lomba memberikan kredit pada sektor riil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Siamat. 1995. **Manajemen Lembaga Keuangan**. Cetakan pertama. Intermedia. Jakarta
- Hasibuan, Malayu SP. 2002. **Manajemen Perbankan**. PT. Toko Agung. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1999. **Standar Akuntansi Keuangan**. Penerbit Salemba Utama. Jakarta.
- Jusuf Jopie. 1996. **Analisa Kredit Untuk Account Officer**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kasmir. 2001. **Manajemen Perbankan**. Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____, 2001. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Cetakan Kelima. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Latumerissa, Julius R. 1996. **Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum**. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 1992. **Analisa Lapozan keuangan untuk perbankan**. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- _____, 1993. **Manajemen Perkreditan bagi bank komersil**. BPFE. Yogyakarta.
- Suyatno, Thomas. 1995. **Dasar-dasar Perkreditan**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Suseno Piter Abdullah. 2003. **Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia.**

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso. 2000. **Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.** Cetakan Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Gultom, Miranda S.. "Pemulihan Kembali Fungsi Intermediasi Perbankan: Upaya Revitalisasi Ekonomi". Diskusi Panel Pemulihan Kembali Fungsi Intermediasi Perbankan Sebagai lembaga intermediasi Bidang Keuangan" tgl 14 february 2002. Jakarta.

Nugroho, Ugie. "Normalisasi Suku Bunga dan Prospek Fungsi Intermediasi Perbankan" 2004. Jakarta.

Laporan tahunan Bank Indonesia 2000-2003. Bank Indonesia. Jakarta.

Susidarto, "Mempertanyakan Fungsi Intermediasi Perbankan" 2000. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Williams. 2001, "Efektifitas Dunia Usaha ". PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta